

# PERTEMUAN TINGKAT MENTERI LUAR NEGERI *ASEAN* *REGIONAL FORUM (ARF)* DI BRUNEI DARUSSALAM

Sita Hidriyah\*)



## Abstrak

*ASEAN berupaya membangun masyarakat dinamis dan tangguh menjelang tahun 2015. Semangat Komunitas ASEAN 2015 adalah terciptanya masyarakat ASEAN sebagai identitas tunggal yang memiliki rasa kekeluargaan dan saling bekerja sama. Komunitas ASEAN yang diharapkan dapat mulai berjalan pada 2015 masih menghadapi jalan terjal dan berliku. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya gesekan kepentingan antaranggota. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, di antaranya dengan cara memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara ASEAN dan mitra dialog untuk menuju saling pengertian dan kerja sama konstruktif. Hal itu menjadi inti pertemuan Menteri Luar Negeri dalam Forum Regional ASEAN dengan negara mitra yang diselenggarakan di Brunei Darussalam akhir Juni 2013. Adanya pertemuan ASEAN tersebut diharapkan bermanfaat dalam mempererat kerja sama di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya.*

## A. Pendahuluan

Pertemuan *ASEAN Regional Forum* (ARF) ke-46 telah berlangsung di Bandar Seri Begawan akhir Juni 2013. Selain negara ASEAN, pertemuan tersebut juga menghadirkan negara mitra yaitu 10 negara Mitra Wicara ASEAN (Amerika Serikat (AS), Kanada, China, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Selandia Baru, dan Uni Eropa) serta beberapa negara di kawasan yaitu: Papua Nugini, Mongolia, Korea Utara (Korut),

Pakistan, Timor-Leste, Bangladesh, dan Sri Lanka.

ARF merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 sebagai suatu wahana bagi dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan. ARF menyepakati bahwa konsep keamanan menyeluruh (*comprehensive security*) tidak hanya mencakup aspek-aspek militer dan isu keamanan tradisional namun juga terkait dengan aspek politik, ekonomi, sosial dan isu lainnya seperti

\*) Peneliti bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: sita.hidriyah@dpr.go.id



isu keamanan non-tradisional. Pertemuan ini menjadi forum untuk menyamakan pandangan dengan tujuan menciptakan stabilitas dan keamanan kawasan.

Brunei sebagai tuan rumah mengusung slogan “Masa Depan Kita Sama” dan menilainya sebagai peran masyarakat di negara-negara anggota ASEAN untuk menciptakan keamanan politik, ekonomi, budaya, dan sosial di kawasan. Topik diskusi pada ARF kali ini mencakup isu-isu yang terkait dengan peta jalan untuk komunitas ASEAN, arah masa depan ASEAN, dan hubungan eksternal ASEAN. Isu-isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain seperti integrasi regional dan kerja sama, keamanan regional, pengelolaan sengketa maritim serta asap lintas batas. ASEAN saat ini tengah memasuki periode baru dengan banyaknya kepentingan internasional dan meningkatnya minat dari berbagai negara terhadap organisasi ini. Pada ARF kali ini, diharapkan pembahasan isu-isu yang menjadi permasalahan dapat menghasilkan kesepakatan serta jalan keluar yang nantinya dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara ASEAN dan mitra dialog untuk menuju saling pengertian, dialog politik, dan kerja sama konstruktif.

## **B. Sengketa Laut China Selatan**

Ketegangan di kawasan Asia Tenggara beberapa tahun terakhir meningkat seiring dengan menjamnya sengketa Laut China Selatan. ASEAN menyadari perlu suatu upaya serius agar Asia Tenggara tidak terjerumus ke dalam konflik bersenjata yang bisa mengancam perdamaian dunia. AS menekan China dan negara-negara anggota ASEAN untuk membuat kemajuan dalam upaya mengurangi ketegangan di Laut China Selatan.

Sengketa Laut China Selatan telah berada dalam proses pembahasan kode tata perilaku/*Code of Conduct* (COC) antara ASEAN dan China, di mana COC itu nantinya akan mengikat secara hukum (*legally binding*) dan bertujuan menurunkan kemungkinan konflik atau insiden serta ketegangan di

kawasan sengketa itu. Pertemuan ini menekan China untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di perairan Laut China Selatan dengan menekankan pentingnya penyelesaian perselisihan secara damai melalui konsultasi yang ramah dan negosiasi berdasarkan prinsip-prinsip universal yang diakui hukum internasional termasuk Konvensi PBB mengenai Hukum Laut tahun 1982. Dalam pertemuan Juli tahun lalu, para menteri luar negeri ASEAN gagal mencapai kesepakatan mengenai masalah tersebut sehingga menjadi pertemuan ARF yang berakhir tanpa mengesahkan sebuah pernyataan bersama.

Dalam pertemuan di Brunei ini tercapai komitmen kolektif para negara anggota ASEAN dan China untuk secara penuh dan efektif mengimplementasikan Deklarasi Perilaku atas Pihak (*Declaration on the Conduct of Parties/DOC*) di Laut China Selatan. Partisipasi Menlu China menjadi yang pertama kali menjadi ketua dalam acara tersebut melalui spektrum aktivitas yang kooperatif dalam bidang politik-keamanan, ekonomi dan sosial-budaya disambut baik.

## **C. Krisis Nuklir Korea**

Krisis nuklir Korut menjadi fokus utama dialog para menlu ASEAN. Masalah itu sangat penting untuk dibahas mengingat lima negara anggota kelompok segi enam yaitu AS, Perancis, Rusia, China dan Inggris untuk menyelesaikan sengketa nuklir Korut, hadir dalam pertemuan di Brunei. Meski para pejabat AS dalam beberapa bulan terakhir berupaya merangkul China untuk meningkatkan tekanan kepada Korut, tapi ASEAN tetap mendesak dimulainya kembali perundingan kelompok segi enam untuk menyelesaikan krisis tersebut. Selama ini, AS dengan alasan program nuklir Korut dan sengketa di Laut China Selatan, telah menambah kehadiran militernya di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Meski negara itu mengklaim tidak memiliki kepentingan di Laut China Selatan, namun kebijakan AS untuk fokus di Asia dengan sendirinya akan membantah klaim itu.

Para Menlu anggota ARF telah bersepakat untuk mendesak Pyongyang melakukan denuklirisasi untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan serta berhenti melakukan sejumlah tindakan provokatif. ARF adalah satu-satunya forum dialog keamanan kawasan yang masih diikuti Korut setelah forum Pembicaraan Enam Pihak (*Six Party Talks*) yang terhenti sejak 2009. Sehingga diharapkan ada tindak lanjut dari Korut untuk mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan secara serius. Namun sayangnya, pihak Korut tidak mau tinggal diam dalam tekanan tersebut. Selain menyebut AS sebagai provokator sejati, Korut juga menegaskan akan mempertahankan program senjata nuklirnya sampai Washington menurunkan sikap permusuhan kecuali AS menghapus semua kebijakan anti-Korut.

#### **D. Kemitraan Strategis ASEAN-China dan Korea Selatan**

Masalah kemitraan strategis ASEAN dengan Korsel dan China juga menjadi perhatian penting. Indonesia memimpin Konferensi antarmenteri ASEAN/*The ASEAN Post Ministerial Conference* (PMC) dengan Korsel yang salah satunya menyambut baik kemajuan substansial implementasi dari rencana aksi ASEAN-Korea dalam Kemitraan Strategis bagi Perdamaian dan Kemakmuran 2011–2015. Pertemuan ini mendorong upaya untuk mengoptimalkan banyak aktivitas yang diadakan pusat promosi kerja sama ASEAN-Korsel khususnya area perdagangan dan investasi, kebudayaan, pariwisata, dan hubungan masyarakat dan informasi termasuk dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah.

Pusat ASEAN-Korsel telah mencanangkan kerja sama dengan Pusat ASEAN-Jepang dan Pusat ASEAN-China dan berharap masing-masing kerja sama itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan dari masing-masing. China dan ASEAN telah bertukar pendapat seputar hubungan dan kerja sama. ASEAN menganggap China sebagai mitra kerja sama strategis dimana

hubungan ASEAN dengan China mencakup semua bidang, yang tidak boleh terpengaruh oleh beberapa permasalahan tertentu. Perkembangan hubungan baik China-ASEAN terus diupayakan meningkat demi menciptakan stabilitas dan perdamaian regional.

#### **E. Kabut Asap Indonesia**

Masalah kabut asap yang berasal dari Indonesia menjadi topik yang disorot serius pada ARF kali ini. Negara-negara kawasan Asia Tenggara kembali mendesak Indonesia untuk segera meratifikasi serta menerapkan Traktat Polusi Kabut Asap Lintas Negara (*ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Brokered*). Traktat tersebut bertujuan menghentikan polusi kabut asap lintas negara akibat kebakaran hutan dengan cara memaksa negara peratifikasi mencegah, memonitor upaya pencegahan, dan saling bertukar informasi tentang kebakaran hutan. Indonesia sendiri belum meratifikasi semenjak kesepakatan tahun 2002 dikarenakan terbentur persetujuan pada parlemen. DPR-RI menolak traktat tersebut karena belum ada batas jelas kewenangan negara tetangga dalam membantu memadamkan api tanpa melanggar batas negara.

Langkah yang akhirnya ditempuh Menlu se-Asia Tenggara menyepakati pembentukan satuan kerja untuk menginvestigasi dan mencari solusi guna mengatasi masalah kabut asap yang muncul dari kebakaran lahan di Indonesia. Satuan kerja terdiri atas para pejabat tinggi dari ketiga negara yang terkena dampaknya, yaitu Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Satuan kerja nantinya akan melaporkan temuan mereka ke masing-masing pimpinan negara.

#### **F. Penutup**

Dalam era globalisasi yang penuh tantangan ini, ASEAN harus terus bebenah diri menghadapi konfigurasi geopolitik internasional yang semakin tidak menentu. Mekanisme konferensi ASEAN selanjutnya

bermanfaat dalam mendorong lebih lanjut kerja sama di kawasan Asia Tenggara maupun di kawasan yang lebih luas. Sebagaimana yang tertera dalam komunike bersama sesuai konferensi, ASEAN harus dapat mewujudkan target pembangunan komunitas bersama sebelum tahun 2015. Komunike tersebut juga mengatakan bahwa ASEAN perlu mengevaluasi kembali mekanisme operasinya, guna menyesuaikan diri dengan perubahan terbaru konfigurasi geopolitik, agar ASEAN dapat terus memainkan peran dominan dalam mekanisme kerja sama regional.

Komunitas ASEAN 2015 juga merupakan ajang perjuangan posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Indonesia adalah ekonomi terbesar di ASEAN. Pemerintah harus segera melakukan introspeksi dan melakukan pembenahan serius dalam menyongsong kehadiran Komunitas ASEAN agar dapat meraih manfaat nyata bagi rakyat. DPR-RI mendorong Pemerintah Indonesia menjadi penggerak utama kemajuan ASEAN di berbagai bidang. Asia Tenggara dengan keunggulan geografisnya dapat berperan penting dalam menciptakan perdamaian kawasan dan peningkatan kerja sama ekonomi. Terbukti dengan mitra dialog ASEAN yang semakin bertambah dalam beberapa tahun terakhir. ASEAN harus terus membenahi organisasinya agar dapat menjadi pusat kerja sama berbagai pihak di kawasan.

Dalam upaya menjaga stabilitas perdamaian kawasan, ASEAN perlu mengambil sikap yang jelas terkait sengketa kawasan perairan Laut China Selatan, mengingat beberapa negara anggota ASEAN terlibat dalam konflik Perairan Laut China Selatan dengan China. Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara besar diharapkan mampu memberikan solusi tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut secara damai. Persengketaan yang

melibatkan China dan sejumlah negara ASEAN menguji sejauh mana peran Indonesia untuk membangun rasa solidaritas kawasan dan mencegah terjadinya eskalasi konflik. DPR-RI perlu mengingatkan Pemerintah untuk cekatan berdiplomasi dalam mengatasi masalah ini sesuai semangat persatuan.

Pada isu bencana asap lintas batas, Pemerintah Indonesia harus fokus pada upaya memadamkan api dan mencegah agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali. DPR-RI dapat mendorong pemerintah untuk terus melakukan upaya kerja sama mengatasi masalah ini dengan tetap memperhatikan kedaulatan bangsa. Hal ini penting karena dengan keterbatasan infrastruktur di Indonesia, negara lain dapat menginterpretasikan pelanggaran kedaulatan sampai ada pemberian batas yang jelas antarnegara dengan membantu memadamkan api tanpa melanggar batas negara.

### Rujukan:

1. "AS Menekan China," *Kompas*, 2 Juli 2013.
2. "Korea Utara Ditekan di ARF," *Kompas*, 3 Juli 2013.
3. "Menlu ASEAN Sepakat Bentuk Satgas Kabut Asap," <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/02/229555/>, diakses 5 Juli 2013.
4. "Menlu Tiongkok Temui Menlu-menlu ASEAN," <http://indonesian.cri.cn/201/2013/07/02/1s139707.htm>, diakses 5 Juli 2013.
5. "Sepuluh Ton Garam Sudah Disebar di Langit Riau," *Republika*, 26 Juni 2013.
6. "Filipina Kembali Serang China: Indonesia Didesak Segera Ratifikasi Traktat Polusi Lintas Negara," *Kompas*, 1 Juli 2013.
7. "Ratifikasi Asap Lintas Batas Masih Panjang," *Kompas*, 4 Juli 2013.